KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Sri Mul Lega
**Tanggal** : Rabu, 25 Agustus 2021
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 1-8

BERBAGI BEBAN APBN DENGAN BI

# Sri Mul Lega

MESKIPUN defisit APBN tembus 6,1 persen karena dihajar Covid-19, Menteri Keuangan, Sri Mulyani masih bisa bernapas lega. Ada dua alasan utama yang membuat Sri Mulyani bisa seperti itu. Pertama, defisit APBN tak sebesar Amerika, China, Inggris, India dan Jepang. Kedua, Bank Indonesia (BI) mau berbagi beban menyelamatkan APBN.

Kemarin, Sri Mulyani menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dia hadir sekitar pukul 11. Sri Mulyani tampil mengenakan blazer abu-abu kombinasi pink.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar ini, mengagendakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022 beserta nota keuangannya.

Dalam paparannya, Sri Mulyani yang merupakan eks Direktur Pelaksana Bank Dunia

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

# Sri Mul Lega

... DARI HALAMAN 1

ini, langsung menanggapi pandangan-pandangan fraksi di DPR soal APBN 2022. Salah satu poin yang dibahas adalah pemerintah terus berupaya menekan utang dan beban bunganya.

Sri Mulyani memaparkan, pandemi Corona membuat defisit APBN tahun lalu tembus 6,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski begitu, kata dia, angka ini jauh lebih rendah ketimbang defisit yang dialami negara lain. Sebut saja Amerika Serikat (AS) yang mengalami defisit 15,8 persen terhadap PDB-nya. Inggris 13,4 persen, Jepang 12,6 persen, India 12,3 persen, dan China 11,4 persen.

Meski begitu, pemerintah tetap harus berutang untuk menambal kantong negara yang defisit. Hasilnya, rasio utang Indonesia pada 2020 naik 9,2 persen secara tahunan (yoy) menjadi 39,4 persen dibanding 2019. Sri Mulyani meminta tidak perlu khawatir dengan rasio utang tersebut. Dia mengklaim, angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan negara lain.

Lalu, dia mencontohkan rasio utang Jepang yang naik 21,4 persen menjadi 256,2 persen. Diikuti AS naik 18,9 persen menjadi 127,1 persen, Inggris 18,4 persen menjadi 103,7 persen, India 15,7 persen menjadi 89,6 persen. Sementara, China rasio utangnya naik 9,8 persen menjadi 66,8 persen.

"Kita masih termasuk kategori negara yang berhati-hati dan pruden dalam mengelola APBN. Bahkan dalam situasi *shock* yang luar biasa," beber Sri Mulyani.

Meski kenaikan utangnya tidak sebesar negara lain, pemerintah tetap melakukan kebijakan *extraordinary*. Salah satunya, melakukan burden sharing alias berbagi beban dengan BI untuk membiayai APBN.

Nah, kemarin, sebelum ke DPR, Sri Mulyani melakukan jumpa pers bersama Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan soal *burden sharing* ini.

Dalam kerja sama ini, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang dari pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 215 triliun dan untuk APBN 2022 sebesar Rp 224 triliun.

Pembelian SBN oleh BI, tambah Sri Mulyani, akan dilakukan melalui mekanisme penempatan langsung (*private placement*). Pembelian oleh BI ini akan mengurangi target lelang SBN di pasar perdana. Dia membantah jika kerja sama ini karena pemerintah kesulitan menarik utang.

"Penekanannya keterpanggilan BI dalam situasi *extraordinary* tetap dalam rambu-rambu BI dalam *monetary policy* dan lihat kemampuan kurangi beban pemerintah," ujarnya.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kerja sama ini sebagai panggilan negara dalam upaya mendukung pemerintah mulai dari Presiden, tenaga medis, satuan tugas (satgas), Kementerian Kesehatan, dan seluruh yang terkait dengan penanganan Corona. Pembelian SBN oleh BI ini juga, digunakan sebagai instrumen operasi moneter.

Ketua Badan Anggaran DPR, MH Said Abdullah mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan BI dengan melakukan burden sharing. Menurutnya, kerja sama ini berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung pemerintah.

"Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, defisit anggaran di 2022 memang diprediksi masih akan lebar. Hal ini dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Meski demikian, Piter menilai, defisit anggaran Indonesia masih akan aman. Demikian juga dengan besaran utang pemerintah. Rasio utang Indonesia juga masih berada di bawah negara-negara maju di kawasan Asia lainnya.

"Yang lebih penting sekarang ini bagaimana memulihkan ekonomi, mencipatakan lapangan kerja mengentaskan kemiskinan," tukas Piter. ■ MEN